

Agus Setyawan | Bartoven Vivit Nurdin | Budisantoso Budiman
Eni Muslihah | Fadilasari | Gatot Arifianto | Hartoyo | H.S. Tisnanta
Isbedy Stiawan Z.S | Iwan Nurdaya-Djafar | Juniardi
Kristian Ali | M. Yamin Panca Setia | Oki Hajiansyah Wahab
Oyos Saroso HN | Syahrhan Lubis | Syarif Makhya
Tri Purna Jaya | Udo Z. Karzi | Yulvianus Harjono

Merajut Jurnalisme Damai di Lampung



Pengantar:
Eko Margadi (Ketua AJI Indonesia)

Catatan Penutup:
Djadjat Sudradjat

Pengunting :
Budisantoso Budiman
Oyos Saroso HN

Diterbitkan oleh :



Merajut Jurnalisme Damai di Lampung

Agus Setyawan | Bartoven Vivit Nurdin | Budisantoso Budiman
Eni Muslihah | Fadilasari | Gatot Arifianto | Hartoyo | H.S. Tisnanta
Isbedy Stiawan Z.S | Iwan Nurdaya-Djafar | Juniardi
Kristian Ali | M. Yamin Panca Setia | Oki Hajiansyah Wahab
Oyos Saroso HN | Syahran Lubis | Syarief Makhya
Tri Purna Jaya | Udo Z. Karzi | Yulvianus Harjono

Penyunting:
Budisantoso Budiman
Oyos Saroso HN



Merajut Jurnalisme Damai di Lampung

Agus Setyawan
Bartoven Vivit Nurdin
Budisantoso Budiman
Eni Muslihah
Fadilasari
Gatot Arifianto
Hartoyo
H.S. Tisnanta
Isbedy Stiawan Z.S
Iwan Nurdaya-Djafar
Juniardi
Kristian Ali
M. Yamin Panca Setia
Oki Hajiansyah Wahab
Oyos Saroso H.N
Syahrani Lubis
Syarif Makhya
Tri Purna Jaya
Udo Z. Karzi
Yulvianus Harjono

Penyunting: Budisantoso Budiman dan Oyos Saroso HN

Penyelarasa Bahasa: Adian Saputra

Foto Sampul: Kristian Ali

Desain Sampul: M. Reza

Tata Letak: Tri Purna Jaya

Diterbitkan pertama kali: Desember 2012

13,5 x 20,5 cm

202 hlm+xx

All Rights Reserved

Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN: 978-602-17314-0-6

Diterbitkan oleh:

AJI Bandar Lampung

Jl. Ahmad Yani, Gg. Pioner, No. 41
Gotong Royong, Bandar Lampung.

Didukung Oleh:

Indepth Publishing

www.indepthpublishing.net

Isbedy Stiawan Z.S.:

INGIN MENYAYANGI

: *tragedi waypanji*

saya ingin menyayangimu karena tahu
kita dari rumpun yang satu, dipaku oleh akar tunggal
dan setiap pagi ataupun malam kita selalu semeja
menikmati makanan yang disajikan ibu
sambil bersenandung:
tanahair yang subur, udaralaut yang harum
oleh gerimis dan garam tubuhmu

maka saya akan selalu mengajakmu bermain di tanah
lapangan yang sejuk di bawah pohon: *gobaksodor* ataupun
petakumpet. siapa pun yang kalah dalam permainan ini,
tak berakhir bertikai. sebab kita tahu dari mana
kita asal, kalau tak dari rumpun yang satu
dan dipaku oleh akar tunggal: lalu rantingnya melambai
bagai bendera negara -- negeri kita --

sebab saya kenal sekali tubuhmu, maka tiap ingin
melukaimu terasa sakit di kulitku. dari rumpun yang satu,
nafas kita pun dari udara yang sama: laut dan gunung
yang sama-sama kita peram

kalau kini tubuhmu tercacah
tubuh saya merahlah sudah!

2 November 2012

Pengantar Penyunfing

**Budisantoso
Budiman,
Oyos Saroso HN**

Setelah konflik bernuansa etnis terjadi di Kabupaten Lampung Selatan, akhir Oktober 2012 lalu, banyak orang kemudian menengok pada sejarah transmigrasi di Lampung. Sebagian orang, termasuk Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P., terkesan malah menyalahkan program transmigrasi. Dari tempat yang jauh, di IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Gubernur Sjachroedin mengatakan bahwa salah satu akar masalah konflik di Lampung Selatan adalah “dulu para pendatang (transmigran) diberi tanah dan rumah, sementara penduduk asli dibiarkan jadi penonton”.

Pernyataan itu masih diulangi Sjachroedin yang juga pensiunan Komisaris Jenderal polisi ini, saat diwawancarai melalui telepon dalam acara talkshow di *TV One*. Transmigrasi seolah-olah menjadi faktor determinan terjadi konflik di Lampung Selatan ‘sonder’ mempertimbangkan faktor kepemimpinan lokal dan ketegasan aparat keamanan. Transmigrasi dituding menjadi “kambing hitam” konflik sosial yang terjadi.

Parahnya lagi, pascakonflik itu kemudian berkembang stigma seolah-olah menjadi pembenar bahwa orang asli (suku) Lampung itu berkarakter tidak baik dan antipendatang. Stigmatisasi itu setidaknya terlontar dari pendapat sosiolog Prof Tamrin Amal Tomagola. Jika stigmatisasi ini terus berkembang tentu saja

akan berdampak buruk. Bisa dibayangkan beberapa tahun ke depan anak-anak muda Lampung yang sedang melanjutkan belajar di Yogyakarta, bisa jadi akan kesulitan mencari rumah kontrakan hanya lantaran stigma buruk itu. Saat mereka lulus dan melamar pekerjaan di daerah lain pun, mungkin akan kurang dipertimbangkan hanya karena mereka berasal dari Lampung. Memang ini bisa jadi hanya merupakan pengandaian yang berlebihan, bahkan terlalu dini. Namun, bukan tidak mungkin hal itu akan terjadi.

Fakta sejarah membuktikan bahwa stigma buruk itu tidak sepenuhnya benar. Contoh paling aktual tentu saja adalah sejarah para pendatang asal Bali di Kabupaten Lampung Selatan. Selama ini sejarah perkembangan kawasan perkampungan Bali di Lampung Selatan selalu menjadi disederhanakan sebagai program transmigrasi yang dijalankan pemerintah seperti berjalan selama ini. Padahal, faktanya perkampungan Bali di Lampung Selatan berbeda dengan perkampungan Bali di daerah-daerah transmigrasi di Lampung, seperti di Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Tulangbawang. Sejarah orang Bali di Lampung Selatan tidak terlepas dari semangat orang asli suku Lampung bernama Intan Mas Jahidin, untuk mempraktikkan nilai-nilai moral suku Lampung.

Intan Mas Jahidin, 91 tahun, tokoh masyarakat Kalianda, Lampung Selatan bisa bercerita banyak tentang sejarah tersebut. Dia-lah yang dulu yang pertama kali menerima orang Bali setelah hijrah ke Lampung akibat letusan Gunung Agung. Intan Mas adalah orang asli Lampung yang mendirikan beberapa perkampungan Bali di Lampung Selatan. Hal itu dilakukan Intan Mas saat menjadi Kepala Negeri Kalianda (sekarang bupati) pada era 1957-1968.

Sebagai Kepala Negeri, Intan Mas kala itu memiliki kekuasaan besar di wilayahnya, baik secara adat maupun dalam Pemerintahan Republik Indonesia. Selain membawahkan pemerintahan

Kalianda, dia juga menjadi *Penyimbang* adat. Pada 1963, ketika lima orang warga dari Pulau Bali datang ke rumahnya untuk meminta bantuan, atas kewenangan yang dimiliki, dia langsung mengiyakannya.

Menurut Intan Mas, pada sekitar tahun 1963, seusai Gunung Agung meletus datanglah lima orang warga Bali ke rumahnya. Kelima orang itu mengaku rumahnya hancur, tidak memiliki apa-apa lagi, dan ingin melanjutkan kehidupan baru di Lampung. Tidak sekadar memberikan tempat menumpang, Intan Mas Jahidin juga menjanjikan memberikan tanah kepada mereka.

Kelima orang itu kemudian pulang ke Bali untuk membawa keluarganya masing-masing.

Demikianlah, ketika mereka kembali ke Lampung Selatan, dengan membawa serta 15 kepala keluarga lain. Masing-masing kepala keluarga diberi jatah tanah marga masing-masing dua hektare. Di atas tanah itulah mereka mendirikan rumah dan bertani di bumi Lampung Selatan.

Selama empat tahun sisa kepemimpinan Intan Mas, setidaknya terdapat 15.000 hektare tanah marga yang telah diberikan kepada sekitar 7.000 kepala keluarga warga Bali yang memilih hijrah ke Lampung itu. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan daerah asal di Bali. Di Lampung Selatan mereka kemudian mendirikan perkampungan Balinuraga, Baliagung, dan Napal. Adapula yang kemudian bergabung dengan warga suku lain, seperti Sidoreno (bersama orang dari Jawa), Palas, dan Sidomakmur.

Intan Mas Jahidin mengaku, kemurahan hatinya tak lain dilandasari semangat nasionalisme dan keinginan untuk berbagi kepada sesama. "Saya tidak pernah melihat apa agamanya dan dari mana sukunya. Kalau saya punya, maka saya akan memberikan apa yang mereka minta. Karena para pendatang Bali itu perlu bantuan, ya saya bantu. Saya ikhlas," kata dia lagi.

Menurut Intan Mas, pemberian jatah tanah kepada para

pendatang dari Bali itu juga sebagai wujud pengalaman salah satu nilai hidup orang Lampung, yaitu *Nemui Nyimah* (terbuka dan menerima tamu dengan baik).

Meskipun kini sudah pension sebagai kepala negeri, Intan Mas Jahidin tetap dihormati oleh warga berbagai suku di Lampung Selatan. Semua gubernur Lampung dan bupati di Lampung Selatan yang baru saja dilantik, selalu menyempatkan datang ke rumahnya untuk minta dukungan dan restu. Ia juga kerap diminta pendapat dan pertimbangannya setiap kali terjadi konflik yang melibatkan orang Lampung dengan warga pendatang.



Lampung dikenal sebagai “Sai Bumi Ruwa Jurai”. Orang Lampung sangat ramah dan terbuka. Orang Lampung juga cinta damai. Karena itu, sebagai wujud kepedulian kami terhadap kedamaian di Lampung, sekumpulan jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandarlampung bersama para akademisi di Lampung, kemudian menggagas penerbitan sebuah buku untuk menyokong perdamaian pascakonflik di Lampung Selatan.

Buku sederhana ini disusun di tengah galau hati dan kekhawatiran masih akan terjadi konflik bernuansa SARA pada masa mendatang. Kalau pun apa yang menjadi kekhawatiran kami itu terjadi, semoga bukan menjadi alamat masa depan persaudaraan dan kedamaian di Lampung akan meredup. Itulah yang kemudian mempertebal tekad kami untuk mengumpulkan tulisan kawan-kawan jurnalis yang berserak di media massa tempat mereka bekerja. Beberapa jurnalis malah menyiapkan diri menulis kembali yang kami perlukan. Kami semakin bersemangat ketika dukungan dari para akademisi dan budayawan juga cukup besar, untuk turut menyumbangkan tulisan dan analisis masing-masing.

Sebermula, buku ini tidak diniatkan sebagai buku yang utuh merupakan hasil riset mendalam, penelitian atau investigasi. Buku ini hanya berupaya untuk memaparkan secuil peristiwa, data, dan fakta lapangan saat terjadi konflik antarwarga di Lampung Selatan. Buku ini juga berupaya dapat mendedahkan beberapa perspektif, analisis, dan tawaran solusi untuk menyelesaikan konflik bernuansa etnis di Lampung.

Kami menyadari bahwa isi maupun tampilan buku ini masih jauh dari sempurna. Karena itulah kami mempermaklumkan buku ini sebagai sebuah wacana terbuka yang siap mendapatkan kritik atau koreksi, sehingga memungkinkan untuk dapat diperbaiki dan disempurnakan lagi pada edisi selanjutnya.

Semoga upaya kecil ini bias tetap memberikan manfaat yang besar bagi kita semua, bagi upaya semua pihak dapat selalu menjaga kehidupan masyarakat yang pluralis dapat selalu hidup berdampingan dengan rasa perdamaian untuk kesejahteraan bersama-sama. Tabik!

Bandarlampung, Desember 2012

Daftar Isi

Ingin Menyayangi	v
<i>: tragedi waypanji</i> Isbedy Stiawan Z.S	
Damai Lampung Sepanjang Hari	vii
Wakos Reza Gautama	
Media Massa dan Pedang Bermata Dua	xi
Eko Maryadi	
Pengantar Penyunting	xiv
Budisantoso Budiman, Oyos Saroso HN	
Daftar Isi	xix
Bagian Satu: Catatan Pembuka	
Pertanyaan-pertanyaan	3
<i>: duka</i> Isbedy Stiawan Z.S	
Catatan Pembuka	4
Budisantoso Budiman, Oyos Saroso HN	
Bagian Dua: Anatomi Konflik Lampung Selatan	
Berbincang Tentang Kupukupu	21
<i>: sehabis pertikaian di Way Panji-Kusumadadi</i> Isbedy Stiawan Z.S	
Menjadi Lampung Dengan Pluralitas	22
--Refleksi atas Kekerasan dan Kerusakan di Lampung Udo Z. Karzi	
Memutus Mata Rantai Konflik di Bumi Lampung	34
Hartoyo	
Kerusuhan Antaretnis dan Problem Integrasi di Lampung	54
Syarief Makhya	
Mencari Jalan Damai	62
H.S. Tisnanta	

Konflik dan Kekerasan di Lampung Selatan	66
Bartoven Vivit Nurdin	
Perdamaian Berbasis Akar Rumput	71
Oki Hajiansyah Wahab	
Mengobati Luka Balinuraga	75
M. Yamin Panca Setia	
Rangkuman Pendapat	99
Bias Informasi Picu Bentrok Berdarah Lampung Selatan	109
Juniardi	
 Bagian Tiga: Jurnalistik Mewartawan Konflik	
Masih Kuingat Pertanyaanmu	117
-- <i>yang baru bertikai</i> Isbedy Stiawan Z.S	
Damai dan Perang Dalam Seuntai Janur	119
Fadilasari	
Saat Kedamaian Tercabik di Balinuraga	130
Kristian Ali	
Memutus Dendam, Merajut Kembali Kebhinekaan	137
Yulvianus Harjono	
“Kami Ingin Hidup Tenram dan Damai”	142
Eni Muslihah	
Penghormatan Kearifan Lokal	150
Syahrhan Lubis	
Pesan Perdamaian Para Aktivis dan Seniman Lampung	153
Gatot Arifianto	
Jurnalisme Damai VS Jurnalisme Perang (dalam Liputan Konflik Balinuraga)	157
Budisantoso Budiman	
 Bagian Keempat: Kesaksian Bagaimana Aku Menandaimu	
Isbedy Stiawan Z.S	
I Wayan Mochoh, Promotor Musik Tradisi Lampung	176
Oyos Saroso H.N.	
Menuju Manusia Antarbudaya	180
Iwan Nurdaya-Djafar	
Catatan Penutup: Lampung	185
Djadjat Sudradjat	
Para Penulis	192

Mencari Jalan Damai

H.S. Tisnanta

Tragedi kemanusiaan kembali terjadi di Kabupaten Lampung Selatan. Amuk massa yang bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) telah menimbulkan banyak korban. Harta benda pun banyak yang ludes. Kejadian itu juga menyisakan goresan luka hati yang sangat sulit untuk disembuhkan.

Anak-anak yang menjadi korban dapat dipastikan akan menyimpan dendam di sudut hati mereka. Demikian pula anak-anak yang tidak terlibat secara langsung. Mereka akan menyimpannya dalam memori yang suatu saat nanti akan menjadi pembenaran atas tindakan serupa.

Saat ribuan orang dari Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Lampung Selatan mengungsi di kampus Sekolah Polisi Negara (SPN), Kemiling, Bandarlampung, semua elemen masyarakat berdatangan untuk memberikan simpati dan bantuan. Berbagai bantuan material datang mengalir. Mulai sembako sampai dengan pakaian bekas yang memenuhi tiga ruang besar di kampus itu.

Bantuan moral juga terlihat nyata dari kegiatan *trauma healing* yang dilakukan di sebuah aula. Anak-anak diajak bernyanyi dan bermain oleh Kelompok Dongeng Dakocan untuk melupakan kejadian mengerikan yang mereka alami. Sementara orang dewasa

dan orang tua hanya duduk di bawah pohon atau tidur di ruang penampungan sambil menghitung hari. Terucap dari salah satu pengungsi bahwa dirinya merasa malu mendapat simpati dan seolah menjadi objek yang tidak berdaya. Di wajah pengungsi tersirat sebuah tanya, “Kapan kami bisa pulang ke rumah? Kami ingin pulang meskipun ruma telah menjadi puing...”

Terungkap secara eksplisit bahwa mereka ingin segera pulang ke Desa Balinurga, karena sejak 1963 di sanalah mereka menjalani hidup dan kehidupannya. Hati mereka semakin terkoyak ketika mengetahui adanya tuntutan agar mereka direlokasi (sebuah istilah untuk menggantikan kata “diusir”) pada acara pertemuan antara bupati dengan tokoh masyarakat.

Atas tuntutan relokasi, bupati sebagai entitas yang mewakili pemerintah sama sekali tidak berlutut. Pemerintah daerah tidak lagi mempunyai legitimasi dan kewibawaan untuk mengatasi dan mengendalikan problem. Wakil rakyat yang setiap bulan menerima gaji sebagai anggota DPRD pun tidak ada suaranya.

Keberadaan pengungsi di kampus SPN sebagai bagian dari langkah tanggap darurat yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah justru dikendalikan oleh Polda Lampung. Singkat kata, dapat dipertanyakan: di mana empati dan tanggung jawab pemerintah daerah? Mengapa amuk massa selalu terjadi di wilayah itu, dan bukankah hal itu dapat dicegah?

Peta Konflik

Pertikaian warga antarkampung ini berulang karena luka lama yang tak tersembuhkan. Rentetan peristiwa yang sama terus terjadi karena tidak ada upaya penanganan yang komprehensif. Perdamaian yang dilakukan hanya bersifat elitis dan tidak pernah menyentuh akar rumput dan permasalahan yang sebenarnya. Trauma dan dendam membara terus hidup di sudut di hati masing-masing pihak yang dapat meledak karena alasan yang paling sederhana sekali pun.

Bila peristiwa terdahulu solidaritas salah satu kelompok demikian kental, maka peristiwa yang terakhir sungguh di luar dugaan. Eskalasi kekuatan massa orang Lampung datang dari berbagai penjuru. Puluhan truk dan alat transportasi yang membawa massa datang ke lokasi kerusuhan.

Tercatat antara lain dari Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Bandarlampung, dan lain sebagainya. Hal ini tidak terlepas ajakan bergabung melalui pesan singkat (SMS) serta jejaring sosial, sehingga gerakan massa menjadi demikian masif.

Atas dasar logika yang paling sederhana, timbul pertanyaan: mengapa tidak dicega? Siapa yang menggerakkan? Siapa yang memfasilitasi pergerakan massa tersebut? Hal ini patut kita tanyakan karena kalau hanya dari Desa Agom dan sekitarnya, jumlah massa tidak akan semasif itu.

Di sisi lain, Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza SZP juga berkonflik dengan masyarakat adat Lampung serta lawan-lawan politiknya. Konflik tersebut berpengaruh pada kewibawaan dan legitimasinya sebagai pemimpin.

Dapat dikatakan bahwa sebagian kemarahan massa sebenarnya juga ditujukan kepada Bupati. Pendek kata, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan *security provider* (aparatur pengamanan) telah gagal mengelola konflik dan mencegahnya.

Penanganan Konflik dan Pengampunan

Penanganan konflik harus dilakukan secara komprehensif, mulai tahapan tanggap darurat sampai dengan penanganan pascakonflik. Setiap tahapan membutuhkan keterlibatan peran pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, masyarakat sipil, unsur penegak hukum, media massa, serta sektor swasta.

Tahapan-tahapan penyelesaian harus menempatkan para pihak yang berkonflik sebagai subjek. Merekalah yang membangun jalan damai dengan menggunakan mereka sendiri. Perdamaian

tidak lagi bergantung pada pemerintah, apalagi pemerintah daerah. Keterlibatan pihak lain hanya sebatas fasilitator sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka.

Para pihak harus dapat menentukan sendiri substansi kesepakatan sebagai landasan damai. Namun, untuk itu ada sikap hati yang harus tertanam terlebih dahulu, yaitu sikap mengampuni. Para pihak tidak lagi menghitung berapa korban nyawa dan berapa kerugian harta di pihaknya. Apa yang terjadi dipahami sebagai sejarah kelam yang harus ditinggalkan.

Meskipun para pihak mempunyai kultur berbeda, tetapi ada nilai universal yang dapat ditarik dari kearifan lokal pada masing-masing pihak. Masyarakat Lampung mempunyai ajaran *Piil Pesenggiri*, yaitu kehormatan diri dalam berpikir dan berperilaku. Di sisi lain masyarakat Bali juga mempunyai ajaran *Tatwam Asi* (kamu adalah aku dan aku adalah kamu). Kedua ajaran tersebut merupakan nilai yang mempertemukan kedua kubu untuk kembali bersatu dan berdampingan seperti hari-hari yang lalu.

**Artikel ini pernah dimuat Lingkar Berita.com*